

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

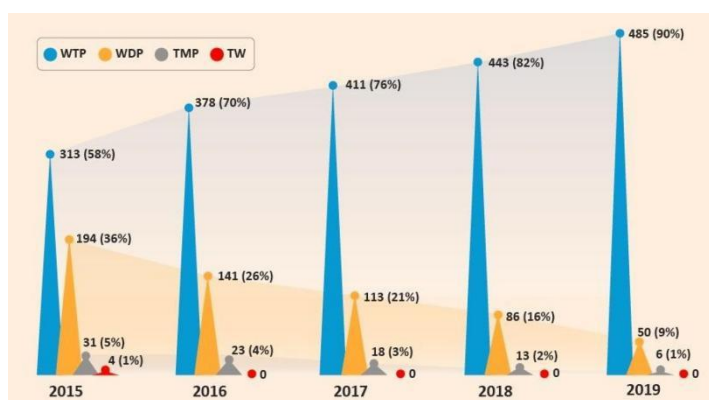
Sebagai salah satu bentuk upaya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah baik pemerintah daerah maupun dewan perwakilan rakyat daerah yang menuntut tugas, asas dan prinsip yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai entitas yang melaksanakan program, tentu diperlukan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Salah satunya dengan membuat laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal itu merupakan upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah atas pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah pernyataan dari pihak agen yang memberikan informasi berupa hasil dari suatu kegiatan perusahaan serta bagaimana kondisi suatu keuangan perusahaan kepada para prinsipal.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah nantinya

akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan suatu tindakan. Informasi yang terdapat didalamnya harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut. Agen harus memerhatikan informasi sebelum dan saat disajikan dalam laporan keuangan guna menunjang dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan serta tentunya mudah dimengerti.

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Layaknya laporan keuangan secara umum, laporan keuangan pemerintah juga memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah selama satu periode. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan pada lampiran I (Indonesia, 2010) menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya jika karakteristik kualitas laporan keuangannya terpenuhi seperti relevan, dapat dibandingkan, andal, serta dapat dipahami. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disampaikan dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan adanya evaluasi peristiwa masa kini dan/atau masa lalu dan memprediksi masa depan. Dalam mencapai relevansi ini tentunya laporan harus di sampaikan dengan ketepatanwaktuan. Ketepatanwaktuan merupakan batasan penting dalam publikasi laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang di sampaikan/ dipublikasikan bebas dari kekeliruan maupun kesalahan baik material maupun non material, menyajikan fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi kebenarannya atau dapat dipercaya. Agar dapat memenuhi karakteristiknya, laporan keuangan harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan agar berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut PP 71 Tahun 2010, keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar adanya atau valid. Sedangkan menurut PP 71 Tahun 2010, ketepatanwaktuan adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil suatu keputusan. Penyampaian informasi secepat mungkin dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi dan mencegah agar tidak terlambatnya dalam pembuatan keputusan. Maka dari itu, agar terselenggaranya karakteristik laporan yang andal dan tepat waktu, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi serta sistem pengendalian internal yang baik.



**Gambar 1. 1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015-2019**

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2020

Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan baik jika mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini dengan tingkat pencapaian terbaik. Meskipun begitu, diraihinya opini WTP saja oleh suatu entitas tidak menjadi suatu tolak ukur bahwa suatu laporan tersebut tidak mempunyai masalah.

Data pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 terjadi peningkatan yang signifikan dengan dimulainya dari tahun 2015 yang memperoleh 58% Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 36% Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 5% Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan 1% Tidak Wajar (TW). Diakhiri dengan jumlah peningkatan yang begitu pesat di atas 30% pada tahun 2019 yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian sehingga menghasilkan 90% Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 9% Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 1% Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal tersebut menandakan bahwa selalu ada perbaikan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap laporan opini yang disampaikannya ke masyarakat walaupun masih ada sedikit yang memperoleh opini WDP dan TMP, dikarenakan masih lemahnya sistem pengendalian internal seperti sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian anggaran pendapatan dan belanja, serta struktur pengendalian internal (RI, 2020). Tetapi hal tersebut menandakan kemajuan yang terjadi pada pemerintah daerah.



**Gambar 1. 2 Permasalahan Opini LKPD 2015-2019**

Sumber : IHPS 2019

Faktor penyebab permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah sangat beragam, salah satunya adalah kesalahan pada sistem pengendalian internal. Data pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 menjadi permasalahan utama dalam opini LKPD 2015-2019 dengan jumlah kasus sebesar 2.753 (47%) dan terjadi di 531 pemda, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dengan 1.826 (31%) kasus dan terjadi di 520 pemda, serta struktur pengendalian intern dengan 1.279 (22%) kasus dan terjadi di 466 pemda. Namun permasalahan opini LKPD Tahun 2019 menurun dan menjadi lebih baik dibandingkan LKPD Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 memperoleh jumlah kasus sebanyak 2.338 (45%) dan terjadi di 526 pemda, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dengan 1.729 (33%) kasus dan terjadi di 518 pemda, serta struktur pengendalian intern dengan 1.108 (22%) kasus dan terjadi di 426 pemda. Secara umum kelemahan sistem pengendalian internal salah satunya terjadi karena belum optimalnya pimpinan dalam melakukan pembinaan mengenai pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta

pengawasan dan pengendalian. Untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait keterandalan dan ketepatanwaktuan pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 1. 1 Daftar Opini LKPD DKI Jakarta Tahun 2015-2019**

Provinsi DKI Jakarta	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS 1 Tahun 2020

Pada Tabel 1.1, fenomena yang terjadi pada pelaporan keuangan pemerintahan DKI Jakarta pada tahun 2013-2016, terdapat kejanggalan sehingga BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian ([www.jakarta.bpk.go.id](http://www.jakarta.bpk.go.id)). Alasan peneliti memilih DKI Jakarta adalah karena DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 29 Tahun 2007, selain itu DKI Jakarta juga merupakan pusat perputaran perekonomian di Indonesia. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan. Keterandalan dan ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

**Tabel 1. 2 Daftar Opini LKPD Kabupaten Jember Tahun 2015-2019**

Kabupaten Jember	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP

Sumber : IHPS 1 Tahun 2020

Pada Tabel 1.2, fenomena yang terjadi pada Kabupaten Jember tahun 2019 merupakan hal yang sangat miris karena mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK (RI, 2020), hal tersebut terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal yang termonitor, pengendalian internal yang andal biasanya memiliki sumber daya manusia yang andal selain itu peneliti memilih Kabupaten Jember karena Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil pendapatan nasional terbesar ke-3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada fenomena ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia masih kurang akan pengetahuan akuntansi dan kebijakan serta sistem akuntansi masih tidak tertata dengan baik, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan pada pelaporan keuangan di Kabupaten Jember sangat buruk ([jatim.bpk.go.id](http://jatim.bpk.go.id)).

Hal pertama yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan dengan berbagai bekal seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai menurut Setyowati et al (2016). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan di dukung latar belakang pendidikan yang baik, khususnya yaitu pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017), Marlinawati & Wardani (2018) bahwa sumber daya manusia

mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan dan dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh BPK yang memberikan temuan empiris bahwa 29,03% unit pengelola keuangan dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di isi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh: 1) Belum ada kebijakan rekrutmen pegawai yang berlatar belakang akuntansi, 2) Walaupun SDM tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan atau melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan menurut Darwin (2018). Jika sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik, dapat diperkirakan akan timbulnya masalah yang baru, BPK berhasil menemukan kejanggalan yang terjadi di Pemprov Provinsi DKI yaitu mencatat aset tanah yang sama tetapi di catat pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ([bpad.jakarta.go.id](http://bpad.jakarta.go.id)). Tetapi dalam penelitian Marlinawati & Wardani (2018) menjelaskan bahwa walaupun sumber daya manusia harus memiliki latar belakang yang baik dalam bidang akuntansi tetapi hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan.

Hal kedua yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Menurut Wibowo (2017:213) dalam Dodopo et al. (2017) hal tersebut semakin dapat memunculkan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap



tinggal dalam organisasi tersebut. Menurut Tampubolon & Basid (2019) menjelaskan bahwa komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan menaruh kepercayaan dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan tidak akan meninggalkan tempat tinggalnya. Karyawan yang komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, berusaha menyumbangkan prestasi demi organisasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasinya. Komitmen akan menciptakan rasa ingin memiliki bagi karyawan terhadap organisasi, tetapi ada pula yang tidak memiliki pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian Tampubolon & Basid (2019) bahwa pada tabel 1.1 tahun 2016 DKI Jakarta memperoleh predikat WDP, hal tersebut ditandai dengan kepercayaan entitas kepada karyawan sehingga menjadikan karyawan tersebut berkomitmen pada entitas nya untuk melakukan yang terbaik terhadap entitasnya walaupun mungkin tidak memiliki latar belakang bidang akuntansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herawati & Apollo (2019) menjelaskan bahwa komitmen organisasi, budaya organisasi dan penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas keuangan laporan organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Nusa Bangsa (2018) dan Setiyawati (2013) menjelaskan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem keuangan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia

dapat memengaruhi komitmen organisasi yang menjadikan hal tersebut sebagai penentuan dalam menentukan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Jika pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki kualitas yang baik maka dapat diperkirakan akan menimbulkan masalah yang baru, seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) DKI Jakarta Tahun 2016 pada tabel 1.1. Ditemukannya sejumlah permasalahan yang salah satunya merupakan sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai dengan standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, serta data kartu inventaris barang tidak formatif atau tidak valid. Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif, suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan menurut Jogiyanto dalam Miharja et al. 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan serta ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan. Tetapi dalam penelitian

Wardani & Nurhayati (2020), Marlinawati & Wardani (2018) menjelaskan bahwa walaupun pemanfaatan teknologi harus memiliki komponen teknologi dengan kualitas yang baik dalam standar akuntansi tetapi hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan.

Hal keempat yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Suatu proses yang penciptaannya dipengaruhi oleh pihak manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan pengertian dari sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006. Sementara proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan tertuang dalam PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga dipaparkan dalam penelitian Putra (2017), Marlinawati & Wardani (2018) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada DKI Jakarta tahun 2016 ditemukan temuan empiris bahwa 25,80% terdapat sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu lemahnya sistem pengendalian intern pemerintahan seperti masih adanya

penyusutan aset yang tidak didukung kertas kerja penyusutan, aset yang di catat tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah, aset tetap, peralatan dan mesin tidak di dukung data rincian, aset gedung dan bangunan serta aset jalan irigasi dan jaringan masih dinilai Rp. 0, Rp. 1, Rp. 1000, dan minus. (bpad.jakarta.go.id). Tetapi dalam penelitian Karmila et al. (2010) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan PelaporanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap

ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?

6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
7. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
8. Apakah pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
4. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
5. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah kualitas sumber

daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

6. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
7. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
8. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

#### **D. Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu terdapat pada lingkup variabel penelitian dengan adanya penambahan variabel independen yang tentu masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai komitmen organisasi terutama pada SKPD wilayah DKI Jakarta. Peneliti memilih komitmen organisasi dikarenakan masih sedikitnya pembahasan yang meneliti mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat menambah bukti empiris serta wawasan mengenai pengaruh antar variabel-variabel yang diteliti dan mengkomunikasikan kembali terkait hasil dari pengaruh antar variabel kepada beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian ini dan hasilnya masih terdapat kontradiksi di dalamnya.

## 2) Manfaat Praktis

Satuan kerja perangkat daerah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi mengenai hal-hal yang dapat memperbaiki dan mengembangkan pelaporan keuangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah dapat menerapkannya pada aktivitas kerjanya sehari-hari sehingga mampu memaksimalkan, memonitor serta memperbaiki kinerja satuan kerja perangkat daerah terutama dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.